

# KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA DAN JEPANG

Oleh  
Yoseph Andreas Gual

## *Abstrac*

*The improve of ICT in a country is influenced by the policy from come out. Indonesia and Japan have that policy but in the reality Japan is more progress than Indonesia. There are many factors caused it. One of the factor is the different of historical education in the both country.*

**Key words:** *ICT Policy, Indonesia, Japan and Historical Education*

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini dalam pembangunan sebuah negara sangat penting dan mendesak. Berdasarkan berbagai penelitian, ditemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu variabel penting perkembangan perekonomian dunia (ITU, 2011). Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan TIK dalam menyampaikan berbagai informasi secara cepat melewati batas ruang dan waktu. Menurut Quibria dan Tschang, 2001 (Hermana, hal. 5) TIK memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui dua cara yakni cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung TIK berpengaruh dalam lingkup (a) informasi mengenai pasar, peluang dan lain-lain; (b) kesempatan kerja; (c) keterampilan dan pendidikan; (d) pemeliharaan kesehatan; (e) pemberian layanan pemerintah dan; (f) pemberdayaan. Sedangkan secara tidak langsung, TIK juga dapat bias meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan memberikan *trickledown effect* terhadap pendapatan dan kesempatan kerja.

Berbagai keunggulan TIK inilah yang mendorong negara-negara berlomba mengembangkan TIK. Diharapkan dengan mengadopsi TIK yang paling mutakhir berdampak pada peningkatakan kesejateraan masyarakatnya baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan, lingkungan, keamanan, pendidikan, gender dan bidang lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan *Economic and Social Commission for Asia dan The Pasific (ESCAP)*-nya pun melihat kemampuan TIK untuk membangun masyarakat Asia-Pasifik yang terbelang masih terbelakang dengan mengintegrasikan TIK dengan *The Millenium Development Goals* (UN-ESCAP, 2006: 71-77).

Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia dan Jepang. Indonesia dengan *Road Map 2010-2020* dan Jepang dengan *e-Japan* dan *u-Japan* merupakan kebijakan strategis untuk mengembangkan TIK di negara masing-masing. Kedua negara sadar bahwa dengan adanya intervensi kebijakan yang tepat, TIK akan berkembang dan pada gilirannya mendukung dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

PBB melalui *United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)* membuat indeks pengembangan TIK yang diukur berdasarkan empat dimensi yaitu keterhubungan (*connectivity*), akses (*access*), kebijakan (*policy*), dan penggunaan (*diffusion*) (Hermana, hal. 2). Dalam tulisan ini, penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana kebijakan yang dibuat Indonesia dan Jepang sehubungan dengan pengembangan TIK. Hal ini menarik sebab dalam pengamatan penulis, kondisi Indonesia dan Jepang sekurang-kurangnya sama dalam dua hal. *Pertama*, Indonesia dan Jepang setidaknya mulai membangun sejak tahun 1945. Pada waktu itu, Indonesia baru merdeka terlepas dari penjajah. Sedangkan Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia II berikut bencana kemanusiaan yakni dua kota besar mereka Hiroshima dan Nagashaki dibom oleh Amerika Serikat yang menyebabkan situasi politik sosial Jepang mengalami perubahan yang sangat drastis. *Kedua*, Indonesia dan Jepang merupakan negara kepulauan dan rawan bencana walau Indonesia lebih luas secara geografis. Indonesia memiliki 13.487 pulau sedangkan Jepang memiliki 6.852 pulau. Kondisi ini membuat, tantangan pengembangan TIK hampir sama.

Walaupun kedua negara memiliki kemiripan dalam dua hal tersebut namun dalam hal kemajuan TIK, Jepang bergerak lebih cepat dari Indonesia. Berdasarkan *ICT Development Index* yang dikeluarkan *International Telecommunication Union (ITU, 2011)*, dari 125 negara di dunia tahun 2010, Jepang berada di peringkat 13 sementara Indonesia tertinggal jauh di peringkat 101. Sedangkan di kawasan Asia-Pasifik, Jepang berada di peringkat 4 sementara Indonesia di peringkat 18 di bawah Singapura-6, Brunai Darusalam-8, Malaysia-9 dan Vietnam-12. Indonesia hanya mengungguli Jepang di bidang penggunaan facebook. Indonesia urutan kedua di bawah Amerika Serikat dalam hal konsumsi facebook.

### **Kebijakan TIK Indonesia**

Radio membutuhkan waktu selama 38 tahun untuk mencapai 50 juta audiens di dunia sementara televisi membutuhkan waktu 13 tahun untuk mencapai jumlah pemirsa yang sama. Internet sebagai salah satu aplikasi TIK memangkas waktu tersebut dengan sangat singkat menjadi 4 tahun. Dengan perkembangan seperti ini, TIK tidak hanya dikuasai oleh segelintir negara maju melainkan dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh negara-tidak terkecuali Indonesia.

Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia menanggapi meluasnya perkembangan TKI dengan berbagai respon yang nantinya akan tertuang dalam berbagai kebijakan yang memayungi segala aktivitas TIK. Proses pengembangan strategi TIK nasional dimulai sejak akhir tahun 1980-an yang dimotori oleh Lemhanas dengan rumusan Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) (Detiknas, 2009: 3). Tahun 1989, ada UU No.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 36 Tahun 1999 yang berisi liberalisasi ekonomi sektor telekomunikasi. UU ini memberi peluang kepada pihak swasta agar dapat menyediakan jasa telekomunikasi secara mandiri tanpa terikat dengan pemerintah. Untuk menindaklanjuti UU di atas, tahun 2000, muncul Peraturan Pemerintah No.52 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi di mana yang bisa menyediakan jasa telekomunikasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta dan koperasi. Tahun 1993/1994, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden yang mengharuskan instansi pemerintah menggunakan personal komputer buatan dalam negeri. Tahun 1997, pemerintah mengeluarkan UU No.8 tentang Dokumen Perusahaan yang mana dokumen perusahaan dapat dialihkan dalam bentuk mikrofilm dan media lain (CD-ROM, dll).

Kebijakan nasional semakin ril mendorong kemajuan TIK terjadi ketika tanggal 31 Juli 1997 pemerintah membentuk Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dengan Keppres No. 30. Saat itu, TKTI memiliki tugas antara lain: (1) merumuskan kebijakan pemerintah di bidang telematika; (2) menetapkan pentahapan dan prioritas pembangunan serta pemanfaatan telematika; (3) melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan telematika dan (4) melaporkan perkembangannya kepada presiden (Hidayat, dkk, 2006: 14-15).

TKTI ini beranggotakan hampir semua anggota kabinet pembangunan yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi dan wakil ketuanya Menteri Pariwisata dan Pos Telekomunikasi. TKTI dibentuk karena munculnya konsep Adimarga Kepulauan Indonesia (*Archipelagic Super Highway*) yaitu konsep pembentukan “Nusantara 21” yang memuat misi pembangunan teknologi informasi di Indonesia (YLTI: 1998). Tiga bidang program utama yang harus dikoordinasi oleh TKTI adalah mewujudkan sistem transmisi dan prasarana, bidang aplikasi dan bidang sumber daya manusia. Selain itu TKTI juga berinisiatif untuk membentuk warung informasi, penyebaran informasi pembangunan dan pembangunan situs informasi serta *database* pembangunan yang rencana akan mencapai seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dilakukan secara bertahap hingga tahun 2004. Namun, rencana ini tidak berjalan karena krisis moneter yang melanda Indonesia.

TKTI direstrukturisasi dengan adanya Keppres No. 186 Tahun 1998 dengan ketuanya Menteri Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. TKTI baru ini melanjutkan tugas TKTI lama dengan mengembangkan *elecronik data interchange (EDI)*, pembentukan *ring of ring* untuk pengembangan jaringan nasional, pembentukan aplikasi SIMKRI, SISKOMDAGRI dan sosialisasi MKT/Y2K atau *millenium bug*.

Pada tahun 2000, TKTI mengalami perubahan struktur lagi, yakni diketuai langsung oleh wakil presiden. Perubahan ini berdasarkan Keppres No. 50 tertanggal 7 April 2000. Keppres dikeluarkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan telematika guna menunjang peningkatan daya saing bangsa. TKTI dibagi dalam lima kelompok kerja (Pokja) yakni pokja bidang aplikasi, bidang SDM dan kultur telematika, bidang industri dan standarisasi, bidang peraturan perundang-undangan dan bidang prasarana.

TKTI juga menyusun rencana kegiatan lima tahunan tentang pengembangan dan pelaksanaan program TIK di Indonesia. Rencana kegiatan disiapkan untuk mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) yang sangat kentara di Indonesia. Rencana kerja ini

melibatkan tiga komponen yakni pemerintah swasta dan komunitas masyarakat dengan empat bidang kegiatan yakni bidang kebijakan dan perangkat hukum; bidang pembangunan SDM; bidang infrastruktur; dan bidang aplikasi. Landasan kerja KTKI mengacu pada Inpres No. 6 Tahun 2001.

Di tahun 2001, TTKI menyusun sebuah konsep pengembangan dan pemanfaatan informasi nasional yang terdokumentasi dalam Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN). Tujuan KTIN ini adalah *e-government for good governance* pada tahun 2005; *e-bussinies* untuk usaha kecil dan menengah pada tahun 2005; TO berbasis masyarakat pada tahun 2010; TI untuk pendidikan pada tahun 2010; *e-democracy* pada tahun 2010.

Tahun 2003, TTKI kembali mengalami restrukturisasi berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 9 tahun 2003 dengan menunjuk Menteri Negara Komunikasi dan Informasi sebagai ketua TTKI dan presiden sebagai pelindungnya. Keppres ini juga mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja yang anggota-anggotanya berasal dari para pakar, pemerhati, dunia usaha, lembaga profesional, perguruan tinggi, komunitas telematika dan masyarakat. Pertimbangan dibentuknya tim baru ini yakni kesadaran akan peran TIK sebagai penunjang kegiatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat serta meningkatkan daya saing negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 24/KEP/M.KOMINFO/6/2003 selaku ketua TTKI maka bidang kerja TTKI bertambah menjadi enam bidang yakni bidang pengembangan infrastruktur; bidang pengembangan aplikasi; bidang peraturan perundang-undangan; bidang sumber daya manusia telematika; bidang pengembangan industri dan standarisasi; bidang pengembangan dunia usaha dan pembiayaan. TTKI juga dibantu oleh sebuah lembaga dari Australia yakni *Intellegence International* yang bertugas sebagai konsultan dalam merumuskan dan menyusun model kelembagaan dan tugas TTKI. Lembaga ini mengusulkan TTKI memfokuskan diri dalam bidang kerja *e-government*, *e-infrasrtucture*, *e-industry*, *e-learning*, dan *e-commerce*.

Pada tahun 2005, presiden mengeluarkan Keppres No 9 Tahun 2005 tentang perubahan Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Keberadaan departemen ini dengan sendirinya membubarkan TTKI sebab sebagian besar tugas TTKI termaktub dalam unit kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Dampak lanjutan dari keputusan presiden yakni berakhirnya keterlibatan *stakeholder* lain secara resmi dalam pembuatan kebijakan TIK.

Pada tahun 2006, Kementerian Negara Riset dan Teknologi menyusun sebuah buku panduan berupa Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK 2005-2025 bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Buku putih tersebut membeberkan lima prioritas utama penelitian TIK di Indonesia yakni infrastruktur informasi, peralatan lunak, content informasi, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan serta regulasi dan standarisasi (Ristek, 2006: 28-94)

Tahun 2006, presiden mengeluarkan Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) di mana presiden sebagai ketua pengarah, Menko perekonomian sebagai wakil dan ketua

tim pelaksana, *ex officio* dijabat menteri komunikasi dan informatika. DETIKNAS memiliki tiga tugas penting yakni (1) merumuskan kebijakan umum dan arah strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan TIK; (2) melakukan studi dan menetapkan langkah-langkah menyelesaikan masalah strategis yang muncul untuk mengembangkan TIK dan; (3) melakukan koordinasi nasional meliputi berbagai institusi pemerintah dari mulai pusat, daerah, BUMN, BUMD, dunia usaha dan lembaga profesional serta komunitas TIK.

DETIKNAS kemudian berhasil menyusun strategi kebijakan TIK nasional yang berisi beberapa item dasar dan turunannya. Item dasarnya yakni (1) intervensi pemerintah untuk menghubungkan masyarakat (*connecting communities*); (2) mensyaratkan porsi komponen lokal untuk setiap intervensi TIK di lingkungan pemerintah dalam rangka industri TIK; (3) menyediakan dana yang bersifat multiyears untuk mencapai *critical mass* TIK dan menjamin keberlanjutan TIK; (4) melengkapi berbagai kebijakan dan peraturan TIK; (5) meningkatkan kualitas SDM TIK melalui kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dengan pusat penelitian dan pendidikan TIK di perguruan tinggi (Detiknas, 2009: 7-8). Strategi kebijakan ini kemudian diturunkan lagi dalam bentuk program strategi TIK.

Program-Program Strategis TIK  
*Flagship Detiknas 2006*

<b>Flagship</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Anggota</b>
National Single Window	Depkeu	Depkoinfo, Depdag, Dephub, Deptan, Dephukham, Deplu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN.
e-Pendidikan	Depdiknas	Bappenas, Depkoinfo, Deperind, KNRT, Kementerian PAN
Palapa Ring	Depkoinfo	Bappenas, Depkeu, Deperind, KNRT
Software Legal	Depkoinfo	Bappenas, Depdag, Depkeu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN.
e-Procurement	Bappenas	Depkoinfo, Depkeu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN.
e-Anggaran	Depkeu	Bappenas, Depkoinfo, Deperind, KNRT, Kementerian PAN.
Nomor Identitas Nasional	Depdagri	Bappenas, Depkoinfo, Depkeu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN.

Sumber: Detiknas, 2009.

Tahun 2010, Departemen Komunikasi dan Informatika mengeluarkan buku putih TIK Indonesia yang di dalamnya berisi tiga bahasan yakni trend TIK, kondisi TIK dan kebijakan TIK Indonesia. Dalam buku putih tersebut dikemukakan bahwa landasan hukum pembangunan TIK adalah pasal 28 f UUD RI 1945 yang kemudian jabarkan

melalui UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Buku putih yang dihasilkan oleh DETIKNAS ini memaparkan *RoadMap* TIK Indonesia 2010-2020 di mana tahun 2010-2012 kebijakan diarahkan untuk mencapai *Indonesia Connected*, tahun 2012-2014 terwujudnya masyarakat *Indonesia Informative*, tahun 2014-2020 terwujudnya *Indonesia Broadband*, dan tahun 2020 ke atas *Indonesia Digital*.



Sumber: Buku Putih TIK Indonesia 2010.

Adapun program prioritas nasional TIK melanjutkan program strategis 2006 tetapi ditambah beberapa program baru. Program-program strategis yakni *Nasional Single Window* (penanggung jawab Kemenkeu), e-pendidikan (Kemendiknas), Palapa Ring (Kemenkominfo), Software Legal (Komenkominfo), e-Procurement (LKPP), e-Anggaran (Kemenkeu), *Single Identity Number* (Kemendagri), *e-Health* (Kemenkes), *e-Cultural Heritage* (Kemenbudpar), dan *e-Agriculture* (Kementan). Buku putih ini juga mengetengahkan *roadmap* migrasi TV analog ke TV digital, *roadmap* internet dan *roadmap* satelit di Indonesia.

## **Kebijakan TIK Jepang**

Revolusi kebijakan TIK Jepang bermula tahun 2000 ketika diberlakukannya UU Teknologi Informasi. UU ini bertujuan agar masyarakat Jepang mengadopsi TIK dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang dikeluarkannya UU tersebut sebab hingga tahun 1999 pemerintah Jepang merasa perkembangan TIK di negara tersebut sangat lambat. Hal itu dapat dilihat dari penetrasi internet dalam masyarakat hanya 13,4% di bawah negara-negara Amerika Utara dan Eropa Utara. Jumlah *broadband* 737.000 di bawah Amerika Serikat dan Korea Selatan (Shimuzu, dkk: 107).

Tahun 2001, berdasarkan UU Teknologi Informasi dibentuklah Badan Promosi Informasi dan Telekomunikasi yang berkedudukan di kementerian dengan tugas merumuskan "*e-Japan Strategy*." Tindak lanjut dari *e-Japan Strategy* adalah mendorong pihak swasta ikut terlibat dalam kebijakan tersebut. Untuk itu, pemerintah Jepang mengeluarkan beberapa program penting yakni mencetuskan aturan persaingan sehat di bidang informasi dan komunikasi bagi pihak swasta, pengembangan SDM, penerapan *e-government* dan mendukung *e-commers*. Tujuan dari *e-Japan Strategy* adalah meningkatkan kemampuan jaringan internet hingga mencapai kecepatan 30-100 Mbps dalam lima tahun dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang murah. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah Jepang mengupayakan perbaikan infrastruktur dan perluasan *broadband* hingga tahun 2003.

Pada tahun 2003, Badan Promosi Informasi dan Telekomunikasi mengeluarkan "*e-Strategy Japan II*" dengan memfokuskan pada perbaikan infrastruktur sekaligus mendorong TIK agar dapat mengintervensi bidang kesehatan, diet, gaya hidup, usaha mikro, ilmu pengetahuan, tenaga kerja dan layanan administrasi.

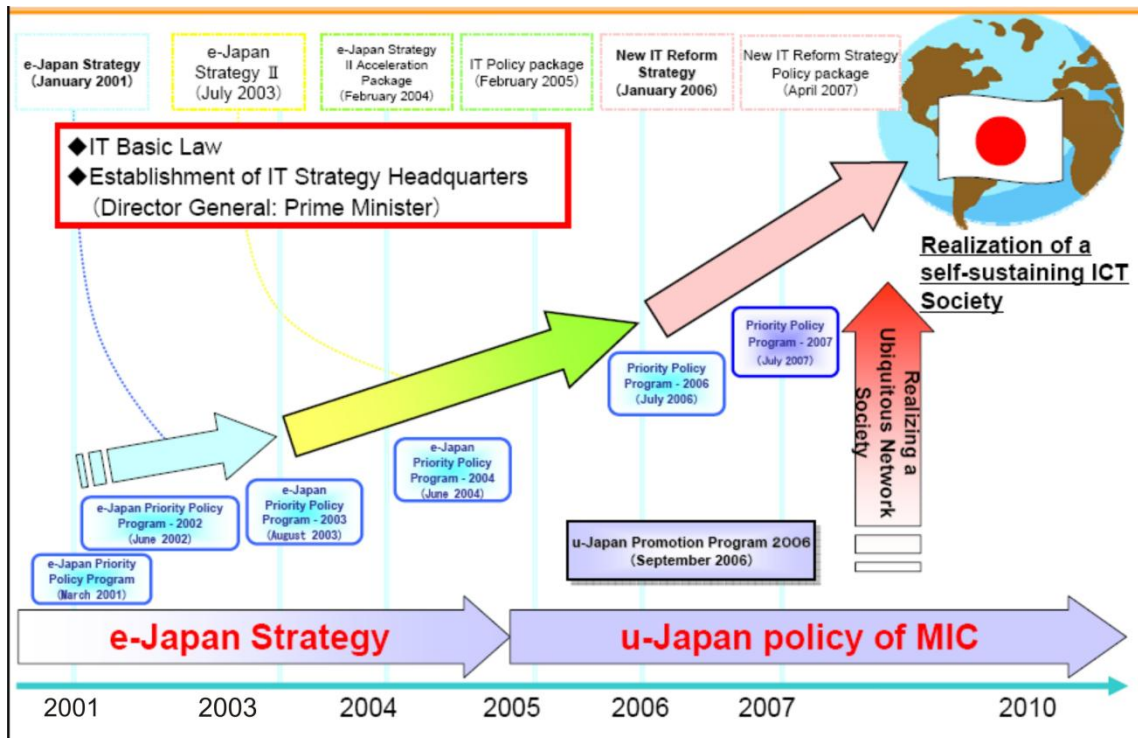
Tahun 2004, sebelum "*e-Strategy Japan II*" selesai, Kementrian dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menyusun kebijakan baru yakni *ubiquitous networked society* atau "*u-Japan Strategy*" untuk tahun 2010 dengan slogan "*at any time, anywhere, with anything and by anyone,*" terjadi di Jepang. Tujuan dari kebijakan ini agar di tahun 2010, Jepang memiliki infrastruktur TIK terbaik di dunia dan berkontribusi kepada dunia dengan menyediakan berbagai produk kreatif dan orisonal khas Jepang. Untuk sampai ke sana pemerintah Jepang mengeluarkan program kerja berupa membangun jaringan nirkabel menembus setiap wilayah, memanfaatkan TIK untuk menyelesaikan masalah sosial, dan memperbaiki lingkungan TIK agar masyarakat pengguna merasa aman bersentuhan dengan TIK.

Pemerintah Jepang sadar bahwa pembangunan TIK membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga pada tahun 2006, Badan Promosi Informasi dan Telekomunikasi mendorong pihak swasta agar lebih terlibat dalam program pengembangan TIK. Lembaga ini pun mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan memfokuskan diri pada tiga hal yakni (1) reformasi struktural di mana TIK diarahkan untuk lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat; (2) perbaikan infrastruktur yakni mengembangkan infrastruktur bergerak agar mempercepat

“ubiquitous networked society atau *u-Japan*” (3) distribusi TIK dimaksudkan agar kemajuan TIK Jepang dapat berkontribusi bagi pembangunan dunia.

Usaha-usaha tersebut bertujuan agar di tahun 2010 semua bidang kehidupan di Jepang sudah terkoneksi dengan internet yang berkemampuan *broadband* dan di tahun 2011 semua komunikasi dan transmisi sudah bersifat digital. Pada tahun 2007 kebijakan *U-Japan* diperbaharui kembali.

Roadmap TIK Jepang



Sumber: Mori, 2008

Sejak tsunami melanda Jepang Maret 2011, arah kebijakan TIK Jepang agak bergeser. Pergeseran itu dapat dilihat melalui enam item dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Informasi dan Komunikasi Jepang (2011) berikut: (1) memperkuat ketahanan infrastruktur TIK terhadap bencana; (2) menghubungkan kembali dan melakukan penguatan obligasi daerah melalui TIK; (3) membangkitkan bisnis baru melalui pemanfaatan TIK; (4) mengatasi kendali energi melalui TIK; (5) memperkuat kerjasama internasional dan kalaborasi di bidang TIK dan; (6) mempromosikan penelitian dan pengembangan di bidang TIK.

### Analisis Kebijakan TIK Kedua Negara dari Sudut Pandang Perjalanan Sejarah

Pertanyaan mendasar yang patut diajukan setelah mengetahui kebijakan kedua negara adalah mengapa TIK Jepang lebih maju dari TIK Indonesia walau keduanya sama-sama memiliki kebijakan. Penulis menggunakan penelusuran sejarah terutama



sejarah pendidikan kedua negara untuk membuka tabir ini. Sebab penulis percaya pendidikan merupakan bagian penting dari sebuah masyarakat agar bisa menerima dan mengembangkan berbagai kemajuan termasuk TIK.

Sebelum restorasi Meiji tahun 1866-1869, Jepang sudah mengenal bentuk pendidikan formal walau pada masa itu mereka masih menutup diri dari dunia luar (Rustam, 2003: 46). Sekolah ini disebut *terakoya* yang diperuntukan bagi masyarakat umum/kecil dan samurai. Setelah Restorasi Meiji, selain membuka diri dengan bangsa barat, pemerintah Jepang juga mencetuskan slogan "*Fukoku Kyoohai*" yakni "Negara Makmur Pertahanan Kuat." Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa-bangsa barat. Untuk itu, pemerintah Jepang melanjutkan pengembangan sistem pendidikan dengan mendirikan lebih dari 51.000 *terakoya* bagi masyarakat luas.

Bey dalam bukunya, Peranan Jepang dalam Pasca Abad Amerika (1990) menyebutkan bahwa kemajuan Jepang dipengaruhi oleh dua faktor penting yakni (1) perhatian besar pemerintah bagi dunia pendidikan. Hal ini tidak hanya dilihat dari sejarah awal mereka tetapi juga terlihat ketika mereka kalah dalam perang dunia kedua, hal pertama yang diprioritaskan pembangunannya adalah dunia pendidikan. (2) Adanya *scientific spirit* yang berakar dalam nilai keagamaan yaitu "*kagaku shinkoo*" atau "agama sains" yang terwujud dalam kemampuan dan hasrat masyarakat Jepang untuk selalu membaca.

Selain dua faktor tersebut, semangat *Bushido* yakni Jalan Ksatria yang merupakan kaidah moral para samurai sangat mewarnai kehidupan masyarakat Jepang. *Bushido* terwujud dalam bentuk kedisiplinan, etos kerja, keuletan, karakter dan pengendalian diri, kemuliaan, kejujuran, kehormatan, kesetiaan, keberanian, dan kesopanan (Clark dan Cunningham, 2007). Semangat inilah yang selalu menjiwai kehidupan keseharian masyarakat Jepang pun mendorong mereka untuk lebih maju dari waktu ke waktu. Dalam bidang penguasaan IPTEK, pada tahun 1958, Jepang mencanangkan pembebasan dari ketergantungan impor dan menjadi negara mandiri dalam memproduksi beragam produk dan inovasi yang berbasis sains dan teknologi (Muttaqin, 2011).

Dengan latar belakang sejarah semacam ini, maka tidak heran jika dalam bidang pengembangan TIK, Jepang lebih memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengembangkan TIK. Dengan dasar pendidikan yang lebih siap, nilai-nilai kebangsaan, sumber modal yang mencukupi dan kemampuan menciptakan kebijakan yang fleksibel dan modern membuat Jepang maju dalam pengembangan TIK. Nilai-nilai *bushido* juga menjadi salah satu penentu kemajuan mereka sebab dengan sendirinya, Jepang bisa mengeliminir masalah mendasar dalam sebuah pemerintahan yakni korupsi yang selama menjadi kanker mematikan dalam tubuh bangsa Indonesia ketika sedang membangun.

Jika Jepang memulai sejarah kebangsaannya dengan cara membuka diri agar terterpa kemajuan bangsa-bangsa barat maka Indonesia memulai sejarahnya dengan perjuangan melepaskan diri dari penjajah barat termasuk dari bangsa Jepang. Jika pendidikan formal dimiliki Jepang dimulai dari bangsa sendiri dan untuk masyarakat

kecil sejak tahun 1800-an maka pendidikan formal di Indonesia dimulai tahun 1930-an yang dibawa oleh Belanda dan hanya diperuntukan bagi sekelompok masyarakat elit.

Jika tahun 1958, bangsa Jepang sudah bergerak untuk mandiri dalam bidang IPTEK maka pada waktu itu Indonesia masih dalam situasi berkonsolidasi untuk mempertahankan kesatuannya dari rongrongan pemberontakan anak negeri. Pembangunan mulai terasa di Indonesia semenjak Soeharto menjadi pemimpin negara dengan dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I tahun 1969-1974) yang titik tekannya pada sektor pertanian.

Jika Jepang memiliki *Bushido* yang menjiwai seluruh kehidupan masyarakatnya maka Indonesia memiliki Pancasila. Namun Pancasila pun hingga kini masih diperdebatkan apakah harus dipertahankan atau diubah. Pluralitas ke-Indonesiaan dan kebelumampuan untuk menerima sebuah nilai bersama inilah mengharuskan bangsa Indonesia terus berdinamika untuk menemukan identitasnya. Korupsi menjadi salah satu contoh kebelumselesaian dinamika bernegara ini. Hal ini mempengaruhi seluruh aspek hidup termasuk dalam hal pengembangan TIK.

Setelah melihat faktor kesejarahan secara umum dalam mempengaruhi kebijakan kedua negara, selanjutnya penulis ingin melihat lebih jauh persoalan kebijakan TIK di Indonesia. Selain latar belakang sejarah di atas, persoalan apa yang sedang melilit TIK Indonesia?

Menurut Setyadi (2003: 3-4) meski kebijakan TIK di Indonesia terhitung sudah banyak namun laju perkembangan TIK masih terasa sangat lambat. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab masalah tersebut. (1) Belum ada kepemimpinan nasional telematika (*e-leadership*) yang dapat dijadikan panutan bagi aparat pemerintah maupun masyarakat luas dalam menetapkan sasaran dan strategi pembangunan telematika. (2) Belum tersedia kebijakan pada setiap jenjang pemerintahan yang dapat menjadi petunjuk operasional. Hal ini menjadi wajar karena karakter budaya Indonesia yang paternalistik sehingga ketika terjadi kekosongan *e-leadership*, birokrat pemerintah di bawahnya tidak termotivasi untuk membangun dan menyediakan perangkat kebijakan yang memfasilitasi pembangunan telematika. (3) Tidak tersedianya anggaran pembangunan yang mencukupi untuk dialokasikan di sektor telematika. Hingga saat ini telekomunikasi dibedakan dari infrastruktur ekonomi lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, dan lapangan terbang. (4) Kurangnya kemampuan dan kesediaan koordinasi antar-instansi pemerintah sehingga menimbulkan duplikasi pekerjaan dan aplikasi yang tidak efisien. (5) Masih kurangnya apresiasi terhadap profesi di bidang telematika sehingga banyak pegawai pemerintah yang memiliki kemampuan namun tidak dapat menerapkan kemampuannya tersebut secara optimal.

Menanggapi persoalan yang dikemukakan oleh Setyadi, pertama-tama setiap pemimpin bangsa ini harus mulai belajar TIK atau dalam hal ini melek TIK. Kemelekan TIK bagi para pemimpin tertinggi hingga level bawah membuat mereka peka terhadap TIK sehingga diharapkan dengan begitu semua kebijakan mereka dapat bersentuhan dengan TIK. *Kedua*, pemerintah perlu memikirkan kebijakan TIK yang lebih holistik

dalam hal ini di tingkat makro dan mikro. *Ketiga*, Pemerintah perlu memikirkan sebuah kebijakan yang mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan TIK baik suprastruktur maupun infrastrukturnya. Pemerintah tidak hanya tergantung pada dana dari APBN melainkan mengusahakan dari sumber-sumber lain. Dan *keempat*, meningkatkan kebijakan pendidikan yang berbasis TIK.

### **Penutup**

Kemajuan TIK di sebuah negara tidak bisa lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintahnya. Kebijakan menjadi jalan bagi sebuah negara untuk mengembangkan ke arah mana TIK mereka akan di bawa. Walau demikian, kemajuan TIK tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhinya. Sebuah kebijakan yang baik belum tentu bisa dilaksanakan jika faktor-faktor yang bersinggungan dengan TIK tidak didorong untuk mendukungnya. Artinya, perlu juga sebuah lingkungan yang baik di tingkat makro maupun mikro agar implementasi kebijakan TIK dapat berjalan.

## Referensi

Bey, Arifin. 1990. Peranan Jepang dalam Pasca Abad Amerika-Serangkai Bunga Rampai. Antarkarya. Jakarta.

Clarck, Tim & Cunnigham, Mark. 2007. Strategi Hideyoshi. Zahir Books. Jakarta.

Detiknas. 2009. Laporan Tiga Tahun Detiknas. Jakarta.

Hermana, Budi. Teknologi Informasi dan Komunikasi di Negara-Negara Asia: Hubungannya dengan Variabel Ekonomi Makro dan Pengembangan Sumber daya Manusia. Universitas Gunadarma.

Hidayat, Dudi, dkk. 2006. Evaluasi Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK. Jakarta.

Information and Communication Council. 2011. ICT Policy for Realizing the Networked Knowledge and Information Society. Comprehensive ICT Strategy for Reconstruction the Tohoku Region and Revitalizing Japan.

International Telecommunication Union. 2011. Measuring The Information Society. Unesco. ITU. Geneva Switzerland.

Kementrian Komunikasi dan Informatika. 2010. Komunikasi dan Informatika Indonesia-Whitepaper 2010. Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Laporan Tiga Tahun Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas). 2009. Jakarta.

Mori, Kiyoshi. 2008. ICT Policy In Japan. PTC'08 30th Anniversary Conference-Opening Plenary.

Mutatqim, Tatang. 2011. Pendidikan: Belajar Pengalaman dari Jepang. Jejaring.com. diunduh 30 Mei 2012.

Ristek. 2006. Indonesia 2005-2025-Buku Putih. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jakarta.

Rustam, Ferry. 2003. Reformasi Pendidikan pada Masa Jepang Meiji: Studi tentang Peran Politik Kekuasaan dalam Penerapan Pendidikan. Dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Volume 7 No. 2 Desember 2003.

Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes. 2003. Makalah: E-Government Sebagai Suatu Investasi: Mengukur Resiko Keuntungan dan Kegagalan – Keberhasilan Implementasi E-Government di Pemerintah Daerah. Jakarta.

Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes. 2007. Makalah: Kebijakan Publik Sektor TIK. Maswig for Mkom Univ-BL. Jakarta.

Shimuzu, Hideo, dkk. Information dan Communication Technologies Policy in Japan: Meeting the Challenges Ahead dalam Global International Report 2006-2007. Polgrave. USA.

United Nation-ESCAP. 2006. Asia-Pacific Journal on Information Communication and Space Technology: Review and Update. New York.

Yayasan Litbang Telekomunikasi Informatika (YLTI). 1998. Nusantara 21-Karangka Konseptual. Jakarta.